



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Usulan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2024 setelah Penetapan Perubahan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
22. Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.073.054.847.926,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	979.752.248.273,00
2. Belanja Daerah	Rp.	1.071.054.847.926,00
Surplus/(Defisit)	(Rp.)	91.302.599.653,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	93.302.599.653,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	2.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	91.302.599.653,00
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

2. Ringkasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 16 DESEMBER 2024
BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 16 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024 NOMOR 28

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN APED						PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN						BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	KET
		RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN					
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 6 - 10	12					
1.04.1.03.2.10.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
5	Belanja Daerah															
5.1	Belanja Operasi															
5.1.01	Belanja Pegawai															
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN															
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Keg	1.122.605.728	1.122.605.728	1	Keg	1.115.605.728	1	Keg	1.115.605.728	1	Keg	1.115.605.728	(7.000.000)	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Keg	112.469.000	112.469.000	1	Keg	112.469.000	1	Keg	112.469.000	1	Keg	112.469.000		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Keg	128.000.000	128.000.000	1	Keg	125.840.000	1	Keg	125.840.000	1	Keg	125.840.000	(2.160.000)	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Keg	-	-	1	Keg	2.160.000	1	Keg	2.160.000	1	Keg	2.160.000	2.160.000	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Keg	28.714.000	28.714.000	1	Keg	28.714.000	1	Keg	28.714.000	1	Keg	28.714.000		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Keg	66.393.000	66.393.000	1	Keg	66.393.000	1	Keg	66.393.000	1	Keg	66.393.000		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Keg	3.824.000	3.824.000	1	Keg	10.824.000	1	Keg	10.824.000	1	Keg	10.824.000	7.000.000	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Keg	43.000	43.000	1	Keg	43.000	1	Keg	43.000	1	Keg	43.000		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Keg	75.433.000	75.433.000	1	Keg	75.433.000	1	Keg	75.433.000	1	Keg	75.433.000		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Keg	2.669.000	2.669.000	1	Keg	2.669.000	1	Keg	2.669.000	1	Keg	2.669.000		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Keg	8.007.000	8.007.000	1	Keg	8.007.000	1	Keg	8.007.000	1	Keg	8.007.000		
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN															
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Keg	528.000.000	528.000.000	1	Keg	528.000.000	1	Keg	528.000.000	1	Keg	528.000.000		
1.05.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN															
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
5	Belanja Daerah															
5.1	Belanja Operasi															
5.1.01	Belanja Pegawai															
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN															
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Keg	829.541.958	829.541.958	1	Keg	844.541.950	1	Keg	844.541.950	1	Keg	844.541.950	16.999.990	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Keg	50.051.700	50.051.700	1	Keg	50.051.700	1	Keg	50.051.700	1	Keg	50.051.700	14.999.992	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Keg	106.216.292	106.216.292	1	Keg	106.216.292	1	Keg	106.216.292	1	Keg	106.216.292		
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Keg	4.952.000	4.952.000	1	Keg	4.952.000	1	Keg	4.952.000	1	Keg	4.952.000		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Keg	155.190.000	155.190.000	1	Keg	155.190.000	1	Keg	155.190.000	1	Keg	155.190.000		
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	1	Keg	-	-	1	Keg	-	1	Keg	-	1	Keg	-		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Keg	6.440.000	6.440.000	1	Keg	6.440.000	1	Keg	6.440.000	1	Keg	6.440.000		
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Keg	3.240.000	3.240.000	1	Keg	3.240.000	1	Keg	3.240.000	1	Keg	3.240.000		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Keg	37.240.000	37.240.000	1	Keg	37.240.000	1	Keg	37.240.000	1	Keg	37.240.000		
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1	Keg	4.530.000	4.530.000	1	Keg	4.530.000	1	Keg	4.530.000	1	Keg	4.530.000		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Keg	50.179.962	50.179.962	1	Keg	52.179.960	1	Keg	52.179.960	1	Keg	52.179.960	1.999.998	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Keg	3.600.002	3.600.002	1	Keg	3.600.002	1	Keg	3.600.002	1	Keg	3.600.002		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Keg	6.379.030	6.379.030	1	Keg	6.379.030	1	Keg	6.379.030	1	Keg	6.379.030		
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1	Keg	8.000.000	8.000.000	1	Keg	8.000.000	1	Keg	8.000.000	1	Keg	8.000.000		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Keg	21.000	21.000	1	Keg	21.000	1	Keg	21.000	1	Keg	21.000		

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN APBD						PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN						BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	KET
		RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN					
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH			
		3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 6 - 10	12					
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Keg	3.706.000	3.706.000	1	Keg	3.706.000	3.706.000	-						
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Keg	1.863.000	1.863.000	1	Keg	1.863.000	1.863.000	-						
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Keg	110.000	110.000	1	Keg	110.000	110.000	-						
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Keg	5.587.000	5.587.000	1	Keg	5.587.000	5.587.000	-						
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1	Keg	331.000	331.000	1	Keg	331.000	331.000	-						
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN			477.629.284	477.629.284			477.629.284	477.629.284	-						
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Keg	472.729.284	472.729.284	1	Keg	472.729.284	472.729.284	-						
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1	Keg	4.900.000	4.900.000	1	Keg	4.900.000	4.900.000	-						
2.07.3.32.0.00.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI															
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.813.695.451				1.813.695.451				1.813.695.451			
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.813.695.451				1.813.695.451				1.813.695.451			
5	Belanja Daerah				1.813.695.451				1.813.695.451				1.813.695.451			
5.1	Belanja Operasi				1.813.695.451				1.813.695.451				1.813.695.451			
5.1.01	Belanja Pegawai				1.813.695.451				1.813.695.451				1.813.695.451			
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				1.373.495.451				1.373.495.451				1.373.495.451			
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Keg	982.890.641	982.890.641	1	Keg	982.890.641	982.890.641	(1.000.000)			981.890.641			
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Keg	22.665.470	22.665.470	1	Keg	22.665.470	22.665.470	-			22.665.470			
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Keg	83.644.046	83.644.046	1	Keg	83.644.046	83.644.046	-			83.644.046			
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Keg	-	-	1	Keg	-	-	-			-			
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Keg	125.782.625	125.782.625	1	Keg	125.782.625	125.782.625	-			125.782.625			
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	1	Keg	-	-	1	Keg	-	-	-			-			
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Keg	15.000.000	15.000.000	1	Keg	15.000.000	15.000.000	-			15.000.000			
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Keg	4.000.000	4.000.000	1	Keg	4.000.000	4.000.000	-			4.000.000			
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Keg	18.213.250	18.213.250	1	Keg	18.213.250	18.213.250	-			18.213.250			
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1	Keg	2.000.000	2.000.000	1	Keg	2.000.000	2.000.000	-			2.000.000			
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Keg	48.103.175	48.103.175	1	Keg	48.103.175	48.103.175	-			48.103.175			
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Keg	512.372	512.372	1	Keg	512.372	512.372	-			512.372			
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Keg	4.972.469	4.972.469	1	Keg	4.972.469	4.972.469	-			4.972.469			
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1	Keg	100.000	100.000	1	Keg	100.000	100.000	-			100.000			
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Keg	22.000	22.000	1	Keg	22.000	22.000	-			22.000			
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Keg	11.000	11.000	1	Keg	11.000	11.000	-			11.000			
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Keg	56.070.266	56.070.266	1	Keg	56.070.266	56.070.266	1.000.000			57.070.266			
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Keg	1.375.000	1.375.000	1	Keg	1.375.000	1.375.000	-			1.375.000			
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Keg	1.978.903	1.978.903	1	Keg	1.978.903	1.978.903	-			1.978.903			
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Keg	54.400	54.400	1	Keg	54.400	54.400	-			54.400			
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Keg	5.936.642	5.936.642	1	Keg	5.936.642	5.936.642	-			5.936.642			
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1	Keg	163.192	163.192	1	Keg	163.192	163.192	-			163.192			
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				440.200.000				440.200.000	-			440.200.000			
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Keg	435.000.000	435.000.000	1	Keg	435.000.000	435.000.000	-			435.000.000			
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1	Keg	5.200.000	5.200.000	1	Keg	5.200.000	5.200.000	-			5.200.000			

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN APBD						PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN						BERTAMBAH / BERKURANG	%	KET
		RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN					
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 6 - 10	12					
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP															
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.826.402.501			1.826.402.501			1.826.402.501				
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.826.402.501			1.826.402.501			1.826.402.501				
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.826.402.501			1.826.402.501			1.826.402.501				
5	Belanja Daerah					1.826.402.501			1.826.402.501			1.826.402.501				
5.1	Belanja Operasi					1.826.402.501			1.826.402.501			1.826.402.501				
5.1.01	Belanja Pegawai					1.826.402.501			1.826.402.501			1.826.402.501				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					1.382.402.501			1.382.402.501			1.382.402.501				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					860.000.000	1	Keg	860.000.000			860.000.000			(1.500.000)	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					87.672.410	1	Keg	87.672.410			87.672.410				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					90.000.000	1	Keg	90.000.000			90.000.000				
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					12.268.256	1	Keg	12.268.256			12.268.256				
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					116.225.000	1	Keg	116.225.000			116.225.000				
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK					-	1	Keg	-			-				
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					67.000.000	1	Keg	67.000.000			67.000.000				
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					-	1	Keg	-			-				
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					14.000.000	1	Keg	14.000.000			14.000.000				
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					5.490.800	1	Keg	5.490.800			5.490.800				
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					50.000.000	1	Keg	50.000.000			50.000.000				
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					8.597.708	1	Keg	8.597.708			8.597.708				
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					2.220.000	1	Keg	2.220.000			2.220.000			1.500.000	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					-	1	Keg	-			-				
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					17.501	1	Keg	17.501			17.501				
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					7.434	1	Keg	7.434			7.434				
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					55.000.000	1	Keg	55.000.000			55.000.000				
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					5.658.142	1	Keg	5.658.142			5.658.142				
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					2.000.000	1	Keg	2.000.000			2.000.000				
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					211.316	1	Keg	211.316			211.316				
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					5.400.000	1	Keg	5.400.000			5.400.000				
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					633.934	1	Keg	633.934			633.934				
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					444.000.000			444.000.000			444.000.000				
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					444.000.000	1	Keg	444.000.000			444.000.000				
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					-	1	Keg	-			-				
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.276.580.651			2.276.580.651			2.276.580.651				
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.276.580.651			2.276.580.651			2.276.580.651				
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.276.580.651			2.276.580.651			2.276.580.651				
5	Belanja Daerah					2.276.580.651			2.276.580.651			2.276.580.651				
5.1	Belanja Operasi					2.276.580.651			2.276.580.651			2.276.580.651				
5.1.01	Belanja Pegawai					2.276.580.651			2.276.580.651			2.276.580.651				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					1.716.580.651			1.716.580.651			1.716.580.651				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					1.156.117.395	1	Keg	1.152.880.221			1.152.880.221			(3.237.174)	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					22.425.200	1	Keg	22.425.200			22.425.200				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					122.013.770	1	Keg	122.013.770			122.013.770				

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN APBD						PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN						BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	KET
		RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN					
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 6 - 10	12					
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Keg	448.504	448.504	1	Keg	448.504	448.504	-		448.504				
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Keg	176.685.250	176.685.250	1	Keg	176.685.250	171.150.000	(5.535.250)		171.150.000				
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	1	Keg	-	-	1	Keg	-	-	-		-				
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Keg	70.220.000	70.220.000	1	Keg	70.220.000	70.220.000	-		70.220.000				
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Keg	1.080.000	1.080.000	1	Keg	1.080.000	1.080.000	-		1.080.000				
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Keg	10.447.250	10.447.250	1	Keg	10.447.250	8.947.250	(1.500.000)		8.947.250				
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1	Keg	2.345.000	2.345.000	1	Keg	2.345.000	2.345.000	-		2.345.000				
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Keg	67.158.686	67.158.686	1	Keg	67.158.686	67.158.686	-		67.158.686				
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Keg	1.013.880	1.013.880	1	Keg	1.013.880	1.013.880	-		1.013.880				
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Keg	3.842.284	3.842.284	1	Keg	3.842.284	7.342.284	3.500.000		7.342.284				
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1	Keg	-	-	1	Keg	-	-	-		-				
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Keg	21.281	21.281	1	Keg	21.281	21.281	-		21.281				
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Keg	1.500	1.500	1	Keg	1.500	1.500	-		1.500				
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Keg	71.581.735	71.581.735	1	Keg	71.581.735	76.354.159	4.772.424		76.354.159				
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Keg	1.249.825	1.249.825	1	Keg	1.249.825	1.249.825	-		1.249.825				
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Keg	2.382.557	2.382.557	1	Keg	2.382.557	3.382.557	1.000.000		3.382.557				
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Keg	99.680	99.680	1	Keg	99.680	99.680	-		99.680				
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Keg	7.147.828	7.147.828	1	Keg	7.147.828	8.147.828	1.000.000		8.147.828				
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1	Keg	299.026	299.026	1	Keg	299.026	299.026	-		299.026				
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				560.000.000				560.000.000			560.000.000				
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Keg	555.000.000	555.000.000	1	Keg	555.000.000	555.000.000	-		555.000.000				
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1	Keg	5.000.000	5.000.000	1	Keg	5.000.000	5.000.000	-		5.000.000				
2.13.5.01.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
5	Belanja Daerah															
5.1	Belanja Operasi															
5.1.01	Belanja Pegawai															
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN															
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Keg	1.176.625.300	1.176.625.300	1	Keg	1.176.625.300	1.176.625.300	-		1.176.625.300				
5.1.01.01.01.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Keg	105.606.000	105.606.000	1	Keg	105.606.000	105.606.000	-		105.606.000				
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Keg	144.007.000	144.007.000	1	Keg	144.007.000	144.007.000	-		144.007.000				
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Keg	-	-	1	Keg	-	-	-		-				
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Keg	63.961.654	63.961.654	1	Keg	63.961.654	63.961.654	-		63.961.654				
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Keg	65.024.000	65.024.000	1	Keg	65.024.000	65.024.000	-		65.024.000				
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Keg	10.471.500	10.471.500	1	Keg	10.471.500	10.471.500	-		10.471.500				
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Keg	55.660	55.660	1	Keg	55.660	55.660	-		55.660				
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Keg	84.000.000	84.000.000	1	Keg	84.000.000	80.000.000	(4.000.000)		80.000.000				
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Keg	3.128.453	3.128.453	1	Keg	3.128.453	3.128.453	-		3.128.453				
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Keg	8.186.000	8.186.000	1	Keg	8.186.000	8.186.000	-		8.186.000				
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN															
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Keg	529.950.509	529.950.509	1	Keg	529.950.509	529.950.509	-		529.950.509				

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN APBD					PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	KET
		RINCIAN PERHITUNGAN					RINCIAN PERHITUNGAN							
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH					
		3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 6 - 10	12			
3.26.2.19.0.00.01.0000	2													
	DIKAS PARIWISATA, KEPENDUDAAN DAN OLAH RAGA													
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
5	Belanja Daerah													
5.1	Belanja Operasi													
5.1.01	Belanja Pegawai													
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN													
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Keg	911.040.413		1	Keg	908.540.413		(2.500.000)				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Keg	70.000.000		1	Keg	70.000.000						
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Keg	110.000.000		1	Keg	109.000.000		(1.000.000)				
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Keg	7.000.000		1	Keg	7.000.000						
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Keg	22.000.000		1	Keg	22.000.000						
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Keg	48.000.000		1	Keg	48.000.000						
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Keg	4.000.000		1	Keg	8.500.000		4.500.000				
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Keg	15.000		1	Keg	15.000						
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Keg	60.000.000		1	Keg	59.000.000		(1.000.000)				
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Keg	3.500.000		1	Keg	3.500.000						
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Keg	7.530.000		1	Keg	7.530.000						
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN													
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Keg	420.000.000		1	Keg	420.000.000						
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN													
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
5	Belanja Daerah													
5.1	Belanja Operasi													
5.1.01	Belanja Pegawai													
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN													
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Keg	5.595.783.030		1	Keg	5.595.783.030						
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Keg	747.590.588		1	Keg	744.590.588		(3.000.000)				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Keg	572.399.312		1	Keg	572.399.312						
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Keg	98.574.749		1	Keg	98.574.749						
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Keg	218.083.750		1	Keg	218.083.750						
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	1	Keg	-		1	Keg	-						
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Keg	839.570.000		1	Keg	839.570.000						
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Keg	106.000.000		1	Keg	106.000.000						
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Keg	30.000.000		1	Keg	30.000.000						
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1	Keg	12.000.000		1	Keg	12.000.000						
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Keg	322.000.000		1	Keg	322.000.000						
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Keg	63.160.226		1	Keg	63.160.226						
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Keg	59.109.352		1	Keg	59.109.352						
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1	Keg	2.000.000		1	Keg	2.000.000						
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Keg	137.000		1	Keg	137.000						

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN APBD						PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN						BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	KET
		RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN					
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 6 - 10	12					
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Keg	26.994	26.994	1	Keg	26.994	26.994	-						
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Keg	350.655.031	350.655.031	1	Keg	350.655.031	350.655.031	-						
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Keg	37.000.000	37.000.000	1	Keg	37.000.000	37.000.000	3.000.000						
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Keg	13.360.074	13.360.074	1	Keg	13.360.074	13.360.074	-						
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Keg	1.572.679	1.572.679	1	Keg	1.572.679	1.572.679	-						
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Keg	35.000.000	35.000.000	1	Keg	35.000.000	35.000.000	-						
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1	Keg	5.493.006	5.493.006	1	Keg	5.493.006	5.493.006	-						
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				2.768.585.650				2.768.585.650	-						
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Keg	2.620.985.650	2.620.985.650	1	Keg	2.620.985.650	2.620.985.650	-						
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1	Keg	147.600.000	147.600.000	1	Keg	147.600.000	147.600.000	-						
3.31.3.30.2.17.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH															
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
5	Belanja Daerah															
5.1	Belanja Operasi															
5.1.01	Belanja Pegawai															
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN															
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Keg	1.076.800.000	1.076.800.000	1	Keg	1.076.800.000	1.076.800.000	(2.000.000)						
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Keg	123.500.000	123.500.000	1	Keg	123.500.000	123.500.000	-						
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Keg	121.500.000	121.500.000	1	Keg	121.500.000	121.500.000	-						
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Keg	24.300.000	24.300.000	1	Keg	24.300.000	24.300.000	-						
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Keg	23.300.000	23.300.000	1	Keg	23.300.000	23.300.000	-						
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Keg	69.250.000	69.250.000	1	Keg	69.250.000	69.250.000	-						
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Keg	2.200.000	2.200.000	1	Keg	2.200.000	2.200.000	-						
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Keg	52.336	52.336	1	Keg	52.336	52.336	-						
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Keg	65.000.000	65.000.000	1	Keg	65.000.000	65.000.000	500.000						
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Keg	2.450.000	2.450.000	1	Keg	2.450.000	2.450.000	-						
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Keg	6.850.000	6.850.000	1	Keg	6.850.000	6.850.000	-						
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN															
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Keg	487.500.000	487.500.000	1	Keg	487.500.000	487.500.000	-						
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD															
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
5	Belanja Daerah															
5.1	Belanja Operasi															
5.1.01	Belanja Pegawai															
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN															
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Keg	1.805.742.000	1.805.742.000	1	Keg	1.805.742.000	1.805.742.000	(2.700.000)						
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Keg	140.647.956	140.647.956	1	Keg	140.647.956	140.647.956	-						

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN APBD						PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN						BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	KET
		RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN					
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	5	4	5	6 = 3 x 5	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	9			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 6 - 10	12					
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Keg	33.964.250	33.964.250	1	Keg	33.964.250	33.964.250	-						
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Keg	-	-	1	Keg	-	-	-						
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Keg	70.788.377	70.788.377	1	Keg	70.788.377	70.788.377	-						
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Keg	1.500.000	1.500.000	1	Keg	1.500.000	1.500.000	-						
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Keg	25.000	25.000	1	Keg	25.000	25.000	-						
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Keg	61.762.711	61.762.711	1	Keg	61.762.711	61.762.711	-						
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Keg	2.600.000	2.600.000	1	Keg	2.600.000	2.600.000	-						
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Keg	7.790.000	7.790.000	1	Keg	7.790.000	7.790.000	-						
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN															
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Keg	362.187.648	362.187.648	1	Keg	362.187.648	362.187.648	(13.400.000)						
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Keg	362.187.648	362.187.648	1	Keg	362.187.648	362.187.648	(13.400.000)						
7.01.2.13.5.01.07.0000	KECAMATAN AIR RAMI															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
5	Belanja Daerah															
5.1	Belanja Operasi															
5.1.01	Belanja Pegawai															
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN															
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Keg	862.602.910	862.602.910	1	Keg	862.602.910	862.602.910	-						
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Keg	85.268.784	85.268.784	1	Keg	85.268.784	85.268.784	-						
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Keg	75.380.000	75.380.000	1	Keg	75.380.000	75.380.000	-						
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Keg	-	-	1	Keg	200.000	200.000	200.000						
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Keg	27.943.000	27.943.000	1	Keg	27.943.000	27.943.000	-						
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Keg	55.409.560	55.409.560	1	Keg	55.409.560	55.409.560	-						
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Keg	1.951.664	1.951.664	1	Keg	1.951.664	1.951.664	-						
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Keg	13.732	13.732	1	Keg	13.732	13.732	-						
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Keg	55.765.249	55.765.249	1	Keg	55.765.249	55.765.249	-						
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Keg	8.971.226	8.971.226	1	Keg	8.971.226	8.971.226	-						
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Keg	5.349.699	5.349.699	1	Keg	5.349.699	5.349.699	-						
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN															
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Keg	334.902.000	334.902.000	1	Keg	334.902.000	334.902.000	-						
7.01.2.13.5.01.10.0000	KECAMATAN PEKARIK															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
5	Belanja Daerah															
5.1	Belanja Operasi															
5.1.01	Belanja Pegawai															
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN															
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Keg	1.287.070.564	1.287.070.564	1	Keg	1.287.070.564	1.287.070.564	-						
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Keg	1.287.070.564	1.287.070.564	1	Keg	1.287.070.564	1.287.070.564	-						
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Keg	1.287.070.564	1.287.070.564	1	Keg	1.287.070.564	1.287.070.564	-						
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Keg	935.458.564	935.458.564	1	Keg	935.458.564	935.458.564	-						
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Keg	674.398.564	674.398.564	1	Keg	674.398.564	674.398.564	-						
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Keg	80.000.000	80.000.000	1	Keg	80.000.000	80.000.000	-						
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Keg	80.000.000	80.000.000	1	Keg	80.000.000	80.000.000	-						
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Keg	80.000.000	80.000.000	1	Keg	80.000.000	80.000.000	-						
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Keg	80.000.000	80.000.000	1	Keg	80.000.000	80.000.000	-						
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Keg	80.000.000	80.000.000	1	Keg	80.000.000	80.000.000	-						
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Keg	80.000.000	80.000.000	1	Keg	80.000.000	80.000.000	-						
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN															
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Keg	1.287.070.564	1.287.070.564	1	Keg	1.287.070.564	1.287.070.564	-						
7.01.2.13.5.01.10.0000	KECAMATAN PEKARIK															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
5	Belanja Daerah															
5.1	Belanja Operasi															
5.1.01	Belanja Pegawai															
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN															
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Keg	1.287.070.564	1.287.070.564	1	Keg	1.287.070.564	1.287.070.564	-						
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Keg	1.287.070.564	1.287.070.564	1	Keg	1.287.070.564	1.287.070.564	-						
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Keg	1.287.070.564	1.287.070.564	1	Keg	1.287.070.564	1.287.070.564	-						
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Keg	935.458.564	935.458.564	1	Keg	935.458.564	935.458.564	-						
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Keg	674.398.564	674.398.564	1	Keg	674.398.564	674.398.564	-						
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Keg	80.000.000	80.000.000	1	Keg	80.000.000	80.000.000	-						
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Keg	80.000.000	80.000.000	1	Keg	80.000.000	80.000.000	-						
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Keg	80.000.000	80.000.000	1	Keg	80.000.000	80.000.000	-						
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Keg	80.000.000	80.000.000	1	Keg	80.000.000	80.000.000	-						
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Keg	80.000.000	80.000.000	1	Keg	80.000.000	80.000.000	-						
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Keg	80.000.000	80.000.000	1	Keg	80.000.000	80.000.000	-						
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN															
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Keg	1.287.070.564	1.287.070.564	1	Keg	1.287.070.564	1.287.070.564	-						

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN APBD						PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN						BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	KET
		RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN					
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH			
		3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 6 - 10						
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Keg	75.000.000	75.000.000	1	Keg	75.000.000	75.000.000	-						
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Keg	-	-	1	Keg	-	-	-						
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Keg	15.350.000	15.350.000	1	Keg	15.350.000	15.350.000	-						
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Bersas PNS	1	Keg	47.000.000	47.000.000	1	Keg	47.000.000	47.000.000	-						
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Keg	2.300.000	2.300.000	1	Keg	2.300.000	2.300.000	-						
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Keg	10.000	10.000	1	Keg	10.000	10.000	-						
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Keg	35.000.000	35.000.000	1	Keg	35.000.000	35.000.000	-						
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Keg	1.650.000	1.650.000	1	Keg	1.650.000	1.650.000	-						
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Keg	4.750.000	4.750.000	1	Keg	4.750.000	4.750.000	-						
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN			351.612.000	351.612.000			351.612.000	351.612.000	-						
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Keg	351.612.000	351.612.000	1	Keg	351.612.000	351.612.000	-						
7.01.2.13.5.01.11.0000	KECAMATAN SELAGAN RAYA															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA															
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
5	Belanja Daerah															
5.1	Belanja Operasi															
5.1.01	Belanja Pegawai															
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN															
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Keg	789.084.579	789.084.579	1	Keg	789.084.579	789.084.579	-						
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Keg	76.310.000	76.310.000	1	Keg	76.310.000	76.310.000	-						
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Keg	68.000.000	68.000.000	1	Keg	68.000.000	68.000.000	-						
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Keg	-	-	1	Keg	-	-	-						
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Keg	25.000.000	25.000.000	1	Keg	25.000.000	25.000.000	-						
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Bersas PNS	1	Keg	38.455.000	38.455.000	1	Keg	38.455.000	38.455.000	-						
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Keg	6.360.000	6.360.000	1	Keg	6.360.000	6.360.000	-						
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Keg	45.000	45.000	1	Keg	45.000	45.000	-						
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Keg	51.475.000	51.475.000	1	Keg	51.475.000	51.475.000	-						
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Keg	1.585.000	1.585.000	1	Keg	1.585.000	1.585.000	-						
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Keg	9.750.000	9.750.000	1	Keg	9.750.000	9.750.000	-						
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN			300.000.000	300.000.000			300.000.000	300.000.000	-						
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Keg	300.000.000	300.000.000	1	Keg	300.000.000	300.000.000	-						
7.01.2.13.5.01.13.0000	KECAMATAN V KOTO															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA															
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
5	Belanja Daerah															
5.1	Belanja Operasi															
5.1.01	Belanja Pegawai															
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN															
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Keg	716.000.000	716.000.000	1	Keg	716.000.000	716.000.000	-						

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN APBD					PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	KET
		RINCIAN PERHITUNGAN					RINCIAN PERHITUNGAN							
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	6 = 3 x 5	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	10 = 7 x 9			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 6 - 10	12			
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Keg	87.125.000	87.125.000	1	Keg	70.000.000	70.000.000	(17.125.000)				
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Keg	77.205.000	77.205.000	1	Keg	77.205.000	77.205.000	-				
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Keg	-	-	1	Keg	-	-	-				
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Keg	26.265.000	26.265.000	1	Keg	26.265.000	26.265.000	-				
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Keg	55.080.000	55.080.000	1	Keg	50.080.000	50.080.000	(5.000.000)				
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Keg	4.365.000	4.365.000	1	Keg	4.365.000	4.365.000	-				
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Keg	19.884	19.884	1	Keg	19.884	19.884	-				
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1	Keg	59.787.000	59.787.000	1	Keg	59.787.000	59.787.000	-				
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Keg	2.145.000	2.145.000	1	Keg	2.145.000	2.145.000	-				
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1	Keg	6.425.000	6.425.000	1	Keg	6.425.000	6.425.000	-				
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN													
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Keg	379.106.545	379.106.545	1	Keg	352.231.545	352.231.545	(26.875.000)				
8.01.2.19.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
5	Belanja Daerah													
5.1	Belanja Operasi													
5.1.01	Belanja Pegawai													
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN													
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Keg	826.765.000	826.765.000	1	Keg	820.765.000	820.765.000	(6.000.000)				
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Keg	59.010.312	59.010.312	1	Keg	59.010.312	59.010.312	-				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Keg	80.950.000	80.950.000	1	Keg	80.950.000	80.950.000	-				
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Keg	4.130.721	4.130.721	1	Keg	4.130.721	4.130.721	-				
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Keg	85.600.000	85.600.000	1	Keg	85.600.000	85.600.000	-				
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	1	Keg	-	-	1	Keg	-	-	-				
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Keg	-	-	1	Keg	-	-	-				
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Keg	9.640.800	9.640.800	1	Keg	9.640.800	9.640.800	-				
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Keg	25.706.000	25.706.000	1	Keg	25.706.000	25.706.000	-				
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1	Keg	3.407.700	3.407.700	1	Keg	3.407.700	3.407.700	-				
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Keg	49.950.000	49.950.000	1	Keg	49.950.000	49.950.000	-				
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Keg	3.350.000	3.350.000	1	Keg	3.350.000	3.350.000	-				
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Keg	1.800.000	1.800.000	1	Keg	1.800.000	1.800.000	-				
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1	Keg	-	-	1	Keg	-	-	-				
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Keg	30.000	30.000	1	Keg	30.000	30.000	-				
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Keg	15.000	15.000	1	Keg	15.000	15.000	-				
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1	Keg	47.900.000	47.900.000	1	Keg	50.900.000	50.900.000	3.000.000				
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Keg	3.692.772	3.692.772	1	Keg	3.692.772	3.692.772	-				
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Keg	1.700.709	1.700.709	1	Keg	1.700.709	1.700.709	-				
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Keg	323.964	323.964	1	Keg	323.964	323.964	-				
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1	Keg	5.102.103	5.102.103	1	Keg	5.102.103	5.102.103	-				
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1	Keg	550.000	550.000	1	Keg	550.000	550.000	-				
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN													
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Keg	410.300.000	410.300.000	1	Keg	400.300.000	400.300.000	3.000.000				
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1	Keg	10.000.000	10.000.000	1	Keg	13.000.000	13.000.000	3.000.000				

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN APBD					PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	KET
		RINCIAN PERHITUNGAN					RINCIAN PERHITUNGAN							
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	6 = 3 x 5	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	10 = 7 x 9			
3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 6 - 10						
1	2												12	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38.327.930				38.327.930					
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				38.327.930				38.327.930					
5	Belanja Daerah				38.327.930				38.327.930					
5.1	Belanja Operasi				38.327.930				38.327.930					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				38.327.930				38.327.930					
5.1.02.01	Belanja Jasa				38.327.930				38.327.930					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				38.327.930				38.327.930					
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1	Keg	2.000.000	2.000.000				1	Keg	-			(2.000.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1	Keg	11.427.930	11.427.930				1	Keg	13.427.930			2.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1	Keg	24.900.000	24.900.000				1	Keg	24.900.000			-

BUPATI MUKOMUKO



SAPUAN